

**GRATIS**  
TANPA IURAN

**EDISI RABU**  
13 SEP 2023



## TIGA KADER PSI MASUK PAN

BACA HALAMAN 4



Prof Dr Phill H Kamaruddin Amin



Drs H Alimuddin, M.Si



Prof Dr Abdunnur, M.Si



Dr Sri Wahyuni, M.PP

**PJ, TIGA  
ATAU  
LIMA?**



Dr Akmal Malik, M.Si

**BACA HALAMAN 2**



**Dr Sri Wahyuni,  
M.PP**



**Prof Dr Phill H  
Kamaruddin Amin**



**Drs H Alimuiddin,  
M.Si**



**Prof Dr Abdunnur,  
M.Si**



**Dr Akmal Malik,  
M.Si**

## PJ, TIGA ATAU LIMA?

Catatan:

**Rizal Effendi**

TINGGAL 17 hari lagi, Kaltim dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur. Siapa yang dipilih Presiden, kita tunggu penetapannya. Jika calon dari DPRD Kaltim sudah masuk ke Mendagri, mungkin dalam beberapa hari ini sudah ada calonnya di meja Presiden.

Sesuai dengan jadwal, Gubernur Isran Noor dan pasangannya Hadi Mulyadi mengakhiri masa jabatannya 30 September 2023. Itu berarti sejak 1 Oktober, Kaltim sudah dipimpin Pj Gubernur. Masa jabatannya relatif lama, sekitar 1 tahun hingga dilantik gubernur definitif di akhir 2024 atau awal 2025.

Jika penetapan atau pelantikan Pj Gubernur terlambat beberapa hari, maka Mendagri bisa menunjuk pelaksana harian (Plh). Biasanya dipercayakan kepada Sekdaprov. Dr Meiliana pernah menjadi Plh Gubernur Kaltim selama 2 hari, 20 September sampai 22 September 2018, sebelum Mendagri melantik Restuardy Daud sebagai Pj.

Seperti kita ketahui, seyogianya calon Pj Gubernur di tangan Mendagri ada 6 nama. Tiga dari Dewan dan 3 dari saku Mendagri sendiri. Tapi dalam kasus Kaltim, DPRD mengirim 5 nama. Apakah yang diseleksi



**Ketua DPRD Kaltim  
Hasanuddin Mas'ud**

Mendagri tetap 3 atau 5 kita tidak tahu.

Dari penjelasan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud kepada wartawan, mereka sengaja mengirim 5 karena itu hasil saringan terakhir dari 8 fraksi. "Ya sudah kita kirim saja semuanya. Itu kesepakatan aklamasi dari semua fraksi," jelasnya.

Lagi pula, kata Hasanuddin, nama yang dikirim belum tentu berjalan mulus. Karena masih harus bersaing dengan 3 nama yang diolah Mendagri. Dan ke-3 nama dari Mendagri sayangnya tidak bisa diketahui, apakah ada yang sama dengan pilihan Dewan atau semua berbeda. Lagi pula proses seleksi dan verifikasi terakhir yang dilakukan Mendagri, Dewan sudah tidak dilibatkan lagi.

Ke-5 nama dari Dewan itu adalah **Drs H Alimuiddin, M.Si** (Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara), **Prof Dr Phil H Kamaruddin Amin** (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag), **Dr Akmal Malik, M.Si** (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), **Dr Sri Wahyuni, M.PP** (Sekwilprov Kaltim) dan **Prof Dr Abdunnur, M.Si** (Rektor Unmul).

Menurut Hasanuddin, pihak Dewan mengirim lengkap dengan nilai pembobotan dan matriksnya. Tapi dia tidak menyebut nama mana yang paling tinggi bobotnya. "Maunya kita Presiden memilih dari nama yang kita usulkan," tambahnya.

Tapi Dewan juga memahami kalau dilihat dari 10 Pj Gubernur yang baru dilantik Presiden, rata-rata semuanya dari calon Pusat. Karena itu perlu upaya ekstra agar calon yang diusulkan dari daerah, yang dipilih oleh Presiden.

**KENAPA ADA AKMAL?**

Ada yang mempertanyakan kenapa Dewan masih memasukkan nama yang tidak masuk kategori putra daerah? Meski putra daerah bukan syarat, tapi waga Kaltim berharap Pj Gubernur adalah orang daerah sendiri. Kapan lagi orang daerah diberi kesempatan. Karena orang daerah lebih tahu apa yang dimau daerah

## Lanjutan Utama

ahnya. Hal itu juga pernah ditegaskan Wakil Ketua Dewan Seno Aji. "Itu yang harus kita terobos," tandasnya.

Kalau mengutip teori Samuel P Huntington, guru besar Ilmu Politik Universitas Harvard, AS, hanya Sri Wahyuni dan Abdunnur yang masuk kategori putra daerah sosiologis. Lahir, tumbuh, besar dan berkarya di daerah sendiri. Sedang Kamaruddin meski lahir di Bontang, tapi banyak berkarya di luar. Baru diketahui namanya pada pemilihan Pj Gubernur. Sehingga ada yang memasukkan nama dia dalam kategori putra daerah politik.

Sebenarnya masih ada satu putra daerah yang masuk kategori putra daerah sosiologis. Yaitu Dr Ir Muhammad Nurdin, MT, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sayang putra kelahiran Samarinda, 10 Mei 1964 ini tersingkir dalam seleksi di DPRD.

Sedang Alimuddin meski bertahun-tahun menjalani karier di Kaltim terutama di Penajam Paser Utara (PPU), tapi sesungguhnya dia kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan. Apalagi Akmal Malik. Tokoh kelahiran Pulau Punjung, Sumatera Barat ini sama sekali tidak pernah bertugas di daerah ini.

Tapi dengan masuknya nama Alimuddin dan Akmal, keduanya punya peluang kuat menjadi pilihan utama Presiden. Karena dia orang dalam IKN, Alimuddin sangat mungkin dipilih Jokowi agar komunikasi dan sinergi program dan tugas antara Pemprov Kaltim dengan Otorita IKN berjalan lancar. Ada yang bilang Alimuddin juga didukung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejauh mana kebenarannya, saya belum mendapat konfirmasi.

Sebelum menjadi Deputi di IKN, Alimuddin adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU. Yang menarik sebelumnya dia merintis karier di militer, kemudian beralih ke PNS. Dia pernah menjadi Komandan Koramil (Danramil) 014/Slawi Tegal, Jawa Tengah.

Sedang Akmal dianggap sangat berpengalaman urusan daerah. Maklum dia Dirjen Otda, yang tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dia menjadi pejabat di Kemendagri yang paling banyak berhubungan dengan kepala daerah.

Masuknya nama Akmal lewat pintu DPRD Kaltim dipastikan ada yang membawa. Bisa

jadi titipan langsung dari Pusat, atau ada juga orang daerah yang berkepentingan dan punya hubungan baik dengan dia. Makanya namanya langsung muncul dan mulus berproses di Dewan.

Akmal juga sudah pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Sehingga sangat mungkin didukung Mendagri. Tapi ada juga yang berpendapat, karena Akmal sudah pernah menjadi Pj Gubernur Sulbar sebaiknya Pj Gubernur Kaltim diberikan kesempatan kepada nama lain, tidak melulu Akmal. "Masa dia terus," kata seorang warga

Dari suara beberapa warga di Samarinda mereka berharap yang dipilih Presiden Jokowi adalah Sri Wahyuni atau Abdunnur. Keduanya sangat Kaltim banget. Besar, sekolah dan bekerja di Kaltim. Jadi layak menjadi pilihan utama.

Sri Wahyuni lahir di Samarinda, 29 Desember 1970. Perjalanan kariernya juga unik. Sebelum terpilih sebagai Sekdaprov, dia pernah menjadi Perwira Pertama Militer Kodim 0803/Madiun.

Pendidikannya selain di IPDN, juga mengikuti Sekolah Perwira Militer. Dia pernah menjadi Lurah di Long Ikis, Kabupaten Paser, Kabag Humas di Pemkab Kukar sampai kepala Dinas Pariwisata di Kaltim. Sekarang Sri juga dipercaya menjadi ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Kaltim masa bakti 2023-2028.

Sedang Abdunnur lahir di Bulungan (saat itu masih masuk wilayah Kaltim), 8 Maret 1967. Dia alumnus Smansa dan menjadi orang daerah pertama yang menjadi rektor Unmul. Ayahnya KH Sabranity, semasa hidup adalah ulama kharismatik di Samarinda.

Pengamat politik Finnah Furqoniahi dari Fisiopol Unmul berpendapat, Abdunnur sangat layak diberi kepercayaan merangkap jadi Pj Gubernur Kaltim. "Selain dirinya lahir dari rahim daerah, tapi juga diyakini mampu mengangkat kearifan lokal demi kepentingan Kaltim dan Nasional," katanya seperti dimuat Sapos.co.id.

Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim (PDKT) Syaharie Jaang juga punya pendapat yang sama. "Kami mengusulkan dan mendukung Rektor Unmul Prof Abdunnur menjadi Pj Gubernur," kata mantan Wali Kota Samarinda ini kepada media.

Isran Noor berharap penggantinya meneruskan dan melanjutkan program yang sudah dirintis dan diperjuangkannya. Serta mampu memberi kontribusi besar untuk kemajuan Kaltim. "Dan yang terpenting tidak berpolitik," tandasnya.\*



**PAN mengumumkan bergabungnya tiga kader PSI.**

## TIGA KADER PSI MASUK PAN

KORANUSANTARA— Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali kehilangan kader menjelang Pemilu 2024. Selasa, 12 September 2023, tiga kader mereka resmi bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN).

Tiga kader itu adalah Idris Ahmad dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Keduanya anggota Fraksi PSI DPRD DKI. Satu lagi Jovin Kurniawan, yang sebelumnya menjabat sekretaris DPD PSI Jakarta.

Ketua DPP PAN Zita Anjani mengatakan, masuknya tiga kader muda tersebut menambah kekuatan partainya. Selain itu, bagian dari komitmen PAN untuk memberikan ruang bagi anak muda. "PAN selalu terbuka menerima kader yang siap bekerja dan membawa semangat baru," ujarnya.

Dia meyakini, tiga mantan kader PSI itu bisa ikut mewarnai kiprah PAN ke depan. Terlebih, ketigan-

ya sudah cukup berpengalaman di dunia politik dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, Idris Ahmad memberikan penjelasan tentang kepindahannya ke PAN. Dia mengaku pindah bukan karena ada masalah di PSI. Dia pun sudah meminta izin secara baik-baik. Dia mengakui, ada banyak pelajaran yang didapat selama lima tahun berkiprah di PSI. Namun, kini dia melihat PAN sebagai kendaraan yang lebih sesuai untuk mewujudkan visi mereka ke depan. "Anak muda tidak hanya diberi ruang, tapi hak isu diperjuangkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, tiga mantan kader PSI itu telah disiapkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari PAN. Mereka akan difokuskan di wilayah DKI Jakarta. (\*)



Ivar Jenner membuka keunggulan Indonesia atas Turkmenistan lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-41.

## GARUDA MUDA PASTIKAN LANGKAH KE QATAR

KORANUSANTARA – Stadion Manahan, Solo tidak bisa menahan euforia suporter Indonesia. Kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong saat bersua Turkmenistan, Selasa (12/9) malam, membuat skuad Garuda Muda memastikan langkahnya ke putaran final Piala Asia U-23 Qatar.

Dua gol dibukukan, masing-masing oleh Ivar Jenner pada menit ke-41 dan Pratama Arhan pada injury time. Kemenangan itu otomatis membuat Rizky Ridho dkk ke Qatar setelah menyapu bersih dua pertandingan di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23. Skuad Garuda sebelumnya melumat Taiwan U-23 dengan skor besar 9-0.

Sukses ini tentu saja layak dirayakan, apalagi pertandingan itu disaksikan langsung oleh

Presiden Joko Widodo. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu tak dapat menyimpan perasaan bahagiannya setelah Pratama Arhan mencetak gol kedua Indonesia di pertandingan tersebut.

Jokowi tampak mengangkat tangannya dari tribun. Beliau bersorak merayakan gol kemenangan itu bersama dengan penonton yang memadati Stadion Manahan Solo.

Sementara Shin Tae-yong selaku pelatih Garuda Muda layak mendapat kredit tersendiri atas pencapaian tersebut. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu telah membawa timnas senior, timnas U-23, dan timnas U-20 tampil di Piala Asia. Akan tetapi, tugas berat telah menanti skuad Garuda Muda di putaran final Piala Asia U-23 yang berlangsung di Qatar

pada 15 April-3 Mei 2024.

Prediksi itu lantaran Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menjalani debut di putaran final Piala Asia U-23 tahun depan. Bandingkan dengan tuan rumah Qatar yang telah empat kali mentas di turnamen tersebut.

Indonesia bahkan masih tertinggal dari negara tetangga di zona Asia Tenggara, seperti Vietnam yang sudah empat kali bermain di putaran final Piala Asia U-23 pada 2016, 2018, 2020, dan 2022.

Walau begitu, banyak pihak diyakini sepakat timnas Indonesia U-23 bakal memberikan permainan terbaik di Qatar nanti. Skuad Garuda Muda membuktikan itu ketika menjalani fase Grup K, khususnya menghadapi Turkmenistan yang sejatinya lebih diunggulkan saat undian.(\*)



Maria Selena

## SUDAH MOVE ON DARI PILOT BULE

KORANUSANTARA –Kisah asmara Puteri Indonesia 2011, Maria Selena tidak semulus perjalanan kariernya. Dia harus mengalami peristiwa pahit saat selangkah lagi menuju pelaminan. Hubungan dengan pilot bule bernama Maui kandas.

Padahal, keduanya sudah merencanakan pernikahan setelah melangsungkan lamaran dua tahun sebelumnya. Namun, Maria tak mau menganggap momen tersebut adalah kegagalan. Melainkan sebuah pengalihan. "Itu redirection. Arahnya dialihkan ke yang lebih baik. Aku nggak sebut gagal. Kalau dalam pertandingan, kalah bukan berarti gagal," kata Maria saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan,

Senin (11/9).

Tahun demi tahun berlalu, model dan presenter itu mengaku sudah menerima kondisinya dengan lapang dada. Dia mengaku sudah bangkit dan tidak lagi ingin mengungkit, apalagi mempermasalahkannya segala yang terjadi di masa lalu. "Ya, aku sudah ikhlas. Sudah move on banget," tuturnya.

Maria mengklaim bahwa kondisinya saat ini jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Aktris berusia 32 tahun itu tengah menikmati kehidupannya sehingga tidak ada waktu untuk merenungi kejadian tersebut. "Kata siapa aku galau? Aku nggak galau. Aku justru lagi lebih bahagia sekarang," tegas Maria. (\*)

**KORAN  
DIGITAL**

**PERTAMA  
& GRATIS**

# **KORAN SULSEL**

**EDISI RABU**  
13 SEP 2023

TERPERCAYA & TERDEPAN

**.COM**



## **TERAPKAN APLIKASI SRIKANDI, PEMKOT PARE-PARE RAIH PENGHARGAAN**



**KEBAKARAN MELANDA PABRIK  
LIMBAH B3 MILIK PEMPROV SULSEL  
BACA HALAMAN...7**



# TERAPKAN APLIKASI SRIKANDI, PEMKOT PARE-PARE RAIH PENGHARGAAN

**PARE-PARE, KORAN SULSEL** - Pangerang Rahim, mewakili Wali Kota Parepare, menerima penghargaan tingkat nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas keberhasilan implementasi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

Penghargaan ini diserahkan Desi Pratiwi, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, dalam sebuah acara di Hotel Sunan Surakarta, Jawa Tengah, pada 6 September 2023 lalu.

Pemkot Parepare meraih pengakuan atas komitmen dan keberhasilannya dalam mengelola arsip elektronik dengan menggunakan Aplikasi SRIKANDI. Dalam pencapaian ini, Kota Parepare telah berhasil mengarsipkan sebanyak 13.508 surat masuk dan 10.815 surat keluar dengan efisien dan terintegrasi.

Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan beberapa kementerian terkait di seluruh Indonesia. Aplikasi ini

diimplementasikan di berbagai pemerintahan daerah untuk mendukung pengelolaan arsip berbasis elektronik atau digital.

Keberhasilan implementasi ini menunjukkan komitmen Kota Parepare dalam menjaga dan mengelola data dan informasi pemerintah dengan efisien, transparan, dan terintegrasi.

Pangerang Rahim, menyatakan rasa bangga atas prestasi ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengimplementasian Aplikasi SRIKANDI di Kota Parepare. "Pemerintah Kota Parepare akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola data yang lebih baik melalui penggunaan teknologi," ucapnya.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pemerintah Kota Parepare dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan arsip telah mendapat pengakuan tingkat nasional. **(KS)**



**Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf saat memberikan sambutan pada apel gabungan OPD lingkup Pemkab Bulukumba di Kantor Bupati Bulukumba, Senin (11/09).**

## **BAGI 10 JUTA BENDERA MERAH PUTIH, BULUKUMBA RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENDAGRI**

**BULUKUMBA, KORAN SULSEL** - Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas peran aktifnya dalam kegiatan pembagian 10 juta bendera Merah Putih pada tahun 2023.

Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi saat memberikan sambutan dalam acara apel gabungan yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bupati Bulukumba, pada Senin (11/9/2023).

Penghargaan tersebut diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Watio, di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, sebagai pengakuan atas upaya dan komitmen Bulukumba dalam mempromosikan semangat kebangsaan.

"Prestasi ini tidak hanya dicapai berkat peran aktif Pemerintah Kabupaten, tetapi juga berkat dukungan penuh

dari seluruh masyarakat Bulukumba, sektor swasta, lembaga vertikal, dan jajaran pemerintahan daerah. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dapat mencapai prestasi gemilang," beber Andi Edy Manaf.

Pencapaian Bulukumba dalam pembagian 10 juta bendera Merah Putih menjadi lebih berharga karena kabupaten ini dipilih sebagai tuan rumah untuk kegiatan tersebut.

Hanya beberapa daerah yang mendapat undangan untuk berpartisipasi, dan Bulukumba termasuk salah satunya.

Untuk diketahui, Puncak Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih berlangsung di kawasan Tanjung Bira Bulukumba pada 11 Agustus 2023, dan acara tersebut mendapat kehormatan dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. (Hms/KS)



## DOSEN FSD UNM GELAR PELATIHAN BATIK TULIS UNTUK GURU SENI BUDAYA, ANGKAT KEARIFAN LOKAL GOWA

MAKASSAR, KORAN SULSEL - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar (UNM) melalui Fakultas Seni dan Desain (FSD) UNM menggelar pelatihan batik tulis bagi guru yang tergabung dalam kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya SMA se-Kabupaten Gowa.

Pelatihan ini dilaksanakan tim pengabdian, yakni Aulia Evawani Nurdin, S.Pd., M.Pd., (sebagai Ketua), Hasnawati, S.Pd., M.Pd., dan Prof. Dr. H. Abd. Aziz Ahmad, M.Pd. (sebagai Anggota). Sebanyak 27 guru seni budaya SMA se-Kabupaten Gowa mengikuti pelatihan yang berlangsung di Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, Kampus 2 Parangtambung, Sabtu, 9 September 2023 lalu.

Dalam pelatihan batik ini, para peserta belajar membuat karya batik tulis dengan menerapkan motif kearifan lokal Gowa. Prosesnya meliputi menggambar pola motif pada kain, mencanting, mewarnai kain, hingga proses pelorodan kain atau pelepasan lilin dari kain.

"Kegiatan membatik merupakan hal baru bagi kami, terlebih motif batik yang diterapkan berbasis kearifan lokal

Gowa," ucap Bunga, Ketua MGMP Seni Budaya SMA Kabupaten Gowa.

Sementara itu, Nur Ulfa, salah satu guru sekaligus peserta pelatihan, menyatakan betapa seru dan menariknya mengikuti pelatihan batik ini secara langsung. "Terutama saat mencanting, kita harus hati-hati dan fokus agar hasil melilinya rapi dan sesuai dengan motif yang sudah digambar," ujarnya.

Aulia Evawani Nurdin menekankan bahwa batik sebagai identitas bangsa Indonesia harus diperkuat oleh peran masyarakat dalam upaya pelestarian budaya. "Masyarakat seharusnya tidak hanya sekadar mengenakan batik, melainkan juga memahami batik yang dikenakannya," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, "Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian budaya, sebagai tempat di mana nilai-nilai budaya dapat diwariskan kepada generasi muda. Guru-guru dilatih membatik agar terampil mengajarkan batik di sekolahnya masing-masing. Ini menjadi salah satu upaya dalam pelestarian budaya batik sebagai identitas nasional," tutup Aulia, Dosen Pendidikan Seni Rupa UNM. (KS)



Penjabat Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membahas target akreditasi Rumah Sakit (RS) bersama BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel.

## PJ SEKPROV SULSEL BAHAS TARGET AKREDITASI RS DENGAN BPJS KESEHATAN

**MAKASSAR, KORAN SULSEL** - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pj Sekprov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, membahas target akreditasi Rumah Sakit (RS) bersama BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel.

Andi Muhammad Arsjad berharap adanya kerja sama dan sinergi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan BPJS Kesehatan, khususnya bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel.

"Sejauh ini kita telah bersinergi dengan baik. Mohon kami diberitahu mengenai acara-acara tertentu. Intinya, berikan kepada kami materi apa yang perlu kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD," ujar Andi Muhammad Arsjad, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (12/9/2023).

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX, dr. Yessi Kumalasari,

mengungkapkan bahwa Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (FKPKU) Provinsi Sulsel akan segera menggelar kegiatan pada akhir bulan September 2023.

"Kegiatan ini rutin dilakukan dua kali dalam setahun. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan dihadiri oleh BPJS Kesehatan serta semua kepala OPD yang terkait dengan program jaminan kesehatan nasional," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut biasanya dilaporkan progres pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dari tiga aspek. Pertama, aspek cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel. Kedua, aspek pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional. Ketiga, aspek pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.

"Masih menjadi perhatian bah-

wa ada dua kabupaten yang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC), yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pinrang. Selain itu, Kabupaten Sidrap memiliki keaktifan peserta yang masih relatif rendah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap adanya kelancaran dalam pembayaran iuran karena hal tersebut berdampak langsung pada pembayaran klaim yang diajukan untuk fasilitas kesehatan.

"Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel sedang mengawal proses akreditasi, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi syarat. Kementerian Kesehatan harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional. Ini menjadi agenda penting dalam pelaksanaan forum komunikasi semester kedua di tahun 2023," pungkasnya. (HMS/KS)



Hadirnya rumah sakit ke delapan milik Pemprov Sulsel ini, sebagai upaya memberikan layanan kesehatan terbaik, berkualitas dan terjangkau.

## SEBULAN BEROPERASI, RSUD LA MAPPAPENNING TELAH LAYANI DUA OPERASI BEDAH DAN PERSALINAN

**BONE, KORAN SULSEL** - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) La Mappapenning Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah beroperasi selama sebulan memberikan layanan kesehatan.

Kehadiran rumah sakit kedelapan milik Pemerintah Provinsi Sulsel ini merupakan upaya untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik, berkualitas, dan terjangkau. Selain itu, tujuannya adalah untuk menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, yang merupakan bagian dari program pri-

oritas di bidang kesehatan.

Rumah sakit ini memiliki visi mewujudkan RSUD yang unggul dalam pelayanan kesehatan dengan menerapkan konsep keterpaduan lingkungan dan pelayanan prima (healing environment and excellent service).

Direktur RSUD La Mappapenning Provinsi Sulsel, Erwan Tri Sulisty, menyampaikan bahwa saat ini rumah sakit telah beroperasi dengan beberapa layanan, seperti interna, penyakit anak, ibu hamil, dan bedah. Pihaknya juga berupaya mengembangkan layanan bagi pasien di Poli Mata, THT,

syaraf, jiwa, dan rehab medik.

"Beberapa waktu lalu, kami telah melakukan operasi perdana di rumah sakit ini. Pada hari itu, ada dua pasien yang dioperasi oleh dokter bedah. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar," jelasnya.

Selain itu, rumah sakit ini juga telah melayani persalinan perdana. "Telah terjadi kelahiran perdana dari seorang ibu yang melahirkan anak pertamanya. Alhamdulillah, bayi sehat dan ibu pun selamat," tuturnya.

Bayi laki-laki tersebut diberi nama Malik Pratama Paisal. **(HMS/KS)**

## KEBAKARAN MELANDA PABRIK LIMBAH B3 MILIK PEMROV SULSEL

**MAKASSAR, KORAN SULSEL** - Kebakaran melanda Pabrik Limbah B3 yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Kejadian ini berlangsung, Senin (12/9), sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Kima 10, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Empat unit mobil pemadam kebakaran dengan cepat datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api yang melalap bangunan pabrik.

Sementara itu, petugas dari Polsek Biringkanaya ikut bertugas menjaga keamanan sekitar lokasi kebakaran dan memastikan situasi tetap terkendali. Apalagi adanya beberapa gulungan kabel listrik yang masih aktif dan berpotensi membahayakan.

"Kami sedang memeriksa kompor pembakaran insinerasi yang diduga menjadi penyebab kebakaran ini," ujar Kapolsek Biringkanaya, AKP H. Muh. Thamrin, SE., MM.,

ia menambahkan bahwa penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. (HMS/KS)



PT KORAN SULSEL PHINISIMEDIA

**KORAN  
SULSEL**  
TERPERCAYA & TERDEPAN .COM

INSPIRASI BARU

**SULSEL**



JUGA HADIR DALAM FORMAT

**E-PAPER**

*Setiap Hari*

**KANTOR REDAKSI :**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 3, AZIZAH RESIDENCE  
NO. B2, RT. 03, RW 01, KEL. TAMALANREA INDAH  
KEC. TAMALANREA, KOTA MAKASSAR  
SULAWESI SELATAN. 90245

**PHINISI RENT  
MAKASSAR**

Layanan  
Pelanggan  
24 Jam  
**085386158899**



# Rental Kendaraan Terlengkap

Mobil, Motor, Sepeda & HT

## Kenapa harus rental di kami?

- ✓ Tidak perlu uang muka
- ✓ Harga terjangkau
- ✓ Armada lengkap
- ✓ Armada keluaran terbaru
- ✓ Servis rutin
- ✓ bisa antar jemput



Sewa Motor Mulai

**70 Ribu**  
/24 Jam

Informasi dan Pemesanan



**085386158899**



**phinisirentmakassar**

Jl. Perintis Kemerdekaan 3, Tamalanrea, Kota Makassar

**Koran DIGITAL**

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

*Lebih Dekat dengan Satu Klik*



**SUDAH 10 HARI, LAHAN GAMBUT  
DESA SABINTULUNG MASIH TERBAKAR**

**BACA HALAMAN 2-3**



**PERMENDAGRI  
PENETAPAN PJ  
GUBERNUR DISEBUT  
ATURAN "BANCI"  
BACA HALAMAN 34**

# Sudah 10 Hari, Lahan Gambut Desa Sabintulung Masih Terbakar

TENGGARONG - Memasuki hari ke-10, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, belum juga padam. Titik-titiknya pun tersebar, dengan beragam luasan. Namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Kartanegara (BPBD Kukar).

Dijelaskan Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kukar, Abdal, belum merinci secara jelas jumlah luasan lahan yang terbakar. Lantaran kondisi lahan gambut yang terbakar masih menyala. Tetapi diperkirakan sudah puluhan hektare yang terdampak. Jumlah ini akan terus bertambah, selama api belum bisa "dijinakkan".

"Ada beberapa titik api, ada yang masih kecil, (kini) yang ditangani yang sudah besar. Luasan masih dihitung, potensi tiap hari bertambah," ungkap Abdal pada mediakaltim.com, Selasa (12/9/2023).

Terkait kendala penanganan, Abdal menyebut bukan kepada ketersediaan air. Tapi lebih kepada kondisi lahan yang terbakar. Yakni memang kelihatannya permukaan lahan berhasil dipadamkan, namun tidak pada bagian bawahnya. Ketika kering, maka akan menyala lagi, karena memang kondisi bagian bawah lahan yang kering.

Dalam upaya pemadaman yang sudah berjalan lebih dari sepekan ini, BPBD Kukar dibantu oleh Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan perusahaan yang beroperasi di Desa Sabintulung. Di mana per-



BPBD KUKAR

**Lahan di Desa Sabintulung yang masih terbakar, terus dilakukan pemadaman oleh BPBD Kukar, Manggala Agni, MPA dan perusahaan.**

sahaan dengan menggunakan alat berat, untuk melakukan penyekatan agar api tidak terus meluas. Juga mengerahkan kendaraan slip on BPBD Kukar, agar lebih memudahkan mobilitas dalam melakukan pemadaman.

"Intinya BPBD dan lainnya akan fokus menangani ini, bersama MPA, termasuk perusahaan membantu," lanjutnya.

Terkait personel yang diturunkan, Abdal menjelaskan membagi dalam tiap pekan. Tiap pekannya sebanyak 10 personel dari BPBD Kukar yang di-

turunkan bersama 7 anggota Manggala Agni. Dan beberapa anggota yang tergabung dalam MPA. Sempat melakukan pergantian personel pada Sabtu (9/9/2023) lalu. Dilanjutkan tim regu 2 BPBD Kukar yang berjumlah 10 orang. Dan bantuan dari perusahaan setempat.

"Selain siapkan alat berat, perusahaan juga siapkan konsumsi dan tempat istirahat bagi para petugas," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i  
Editor : Nicha Ratnasari



Proses penanggulangan karhutla oleh petugas.

## Siaga Darurat Karhutla di Paser, Akibat Buka Lahan dengan Dibakar

**PASER** – Musim kemarau yang diperparah kekeringan di sejumlah wilayah jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Sejauh ini, Pemkab Paser sudah menetapkan siaga darurat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Paser.

Hal itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI nomor 11 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla, yang diterbitkan sejak Senin 24 Juli 2023 lalu.

Dari penetapan siaga darurat itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser mencatat, sebanyak 91 kasus karhutla sudah terjadi hingga pertengahan September 2023 ini. Dari total kasus tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 300,85 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan.

Menanggapi sederet persoalan karhutla tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Paser, Ruslan menyebut, kasus kebakaran yang marak terjadi diduga disebabkan adanya unsur kesengajaan oleh

oknum masyarakat.

“Memang ada unsur sengaja oleh masyarakat, melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar,” kata Ruslan, saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023).

Sementara, meluasnya kebakaran yang kerap terjadi, ditambahkan Ruslan, karena pada proses pemadaman juga dihadapkan dengan kendala. Kendala itu di antaranya peralatan yang terbatas dan ketersediaan air yang sulit didapatkan khususnya di lokasi pemadaman terdekat.

“Kendalanya itu berupa embung yang jauh dari titik kebakaran. Termasuk debit air sungai mulai mengering,” tambahnya.

Selain kendala kendala itu, beberapa lokasi kebakaran tidak mampu dilalui oleh armada yang tersedia. Sehingga petugas lapangan berupaya melakukan pemadaman secara manual menggunakan dedaunan.

“Karena petugas juga kesulitan, saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tegasnya.

Dari 91 kasus tersebut, Kecamatan Tanah Grogot tercatat sebagai wilayah

dengan kejadian terluas mencapai 169 hektare dengan 44 kejadian. Sementara wilayah terluas kedua yaitu Kecamatan Long Kali mencapai 57,65 hektare dengan 7 kejadian.

Berbeda dengan Kecamatan Paser Belengkong dengan luasan yang terbakar mencapai 41,6 hektare namun dengan 8 kejadian. Di Kecamatan Muara Samu, luasan wilayah yang terbakar mencapai 10,92 hektare dengan 6 kejadian.

Di Kecamatan Long Ikis luasan wilayah yang terbakar mencapai 5,7 hektare dengan kejadian. Uniknya, di Kecamatan Batu Engau luasan wilayah yang terdampak hanya 5,48 hektare namun peristiwa kebakarannya mencapai 13 kejadian.

Sementara Kecamatan Tanjung Harapan luasan wilayah yang terbakar mencapai 5 hektare dengan jumlah 3 kejadian. Di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Kuaro kasus kebakaran mencapai 1 hektare dan 0,5 hektare yang masing-masing 1 kejadian.

Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

# GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE  
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure\_samarinda 0811 - 551 - 6000

[all.accor.com](https://all.accor.com)



## Pemprov Kaltara Raih Penghargaan 'Indonesia 12aya' Kompas TV

**JAKARTA** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan dalam acara malam puncak "Indonesia 12aya" yang merupakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kompas TV. Penghargaan ini diterima di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, pada, Senin (11/9/2023) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., yang mewakili Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menerima penghargaan kategori "Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal" secara langsung dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Sekprov Suriansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerjasama dalam pengembangan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia di Kaltara.

"Terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam mengembangkan program kegiatan untuk memberdayakan UMKM dan memperjuangkan kemajuan daerah kita," ujar Sekprov Kaltara, Suriansyah.

Pemprov Kaltara, lanjut Sekprov, memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan UMKM dan memanfaatkan sumber daya lokal. Hal ini terbukti saat pandemi Covid-19, di mana Pemerintah Provinsi Kaltara terus mendorong penggunaan dan konsumsi hasil bumi Benuanta dengan bangga.

"Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal, terutama UMKM, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Per-gub) tentang Penggunaan Pangan Lokal, Batik Khas daerah Kaltara,"

jelasnya.

Namun, dalam setiap penyelenggaraan event-event, Pemerintah Provinsi Kaltara selalu aktif melibatkan UMKM dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Sekprov Suriansyah berharap UMKM dan sumber daya lokal di Kaltara dapat terus tumbuh dengan kualitas tinggi dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

"Harapan kami adalah agar UMKM kita dapat menjadi lebih mandiri, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kaltara, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bersaing di tingkat internasional," pungkasnya. (dkisp)



**MONITORING:** Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si meninjau kegiatan normalisasi Sungai Buaya, Tanjung Selor, Selasa (12/9).

## Wagub Yansen TP : Normalisasi Sungai Buaya jadi Kebutuhan Mendesak

**TANJUNG SELOR** - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si, melakukan peninjauan kegiatan normalisasi Sungai Buaya Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada Selasa (12/9). Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan normalisasi sungai berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam peninjauannya, Wagub didampingi oleh beberapa pejabat, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Bulungan, Errin Wiranda, SE, Kepala Biro Pembangunan Kaltara, Sapi'i, Kepala Satpol PP Kaltara, Selamat R, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Wagub Kaltara mengatakan bah-

wa normalisasi Sungai Buaya adalah langkah penting dalam upaya mengatasi banjir di wilayah Kaltara. Sungai Buaya, sebagai salah satu sungai di Kaltara, memiliki potensi banjir yang signifikan.

"Normalisasi sungai ini sangat penting dan merupakan kebutuhan mendesak," ujar Wagub Kaltara, Yansen TP.

Sesuai kondisi di lapangan, progress normalisasi Sungai Buaya pada segmen I, hasil kerjasama antara Pemprov Kaltara dengan Komando Resort (Korem) 092/Maharajalila, telah mencapai 59,94 persen. Sementara pada pengerjaan segmen II, yang menjadi tanggung jawab Pem-

prov Kaltara melalui DPUPR-Perkim, progresnya telah mencapai 30,27 persen.

Kegiatan normalisasi ini mencakup pengerukan endapan lumpur hingga kedalaman 2 meter, pembersihan sampah dan eceng gondok di sungai. Selain itu, juga ada pengerukan sedimen di sekitar sungai untuk memperlebarnya hingga lebar mencapai 30 meter.

Wagub Yansen TP berharap agar kegiatan normalisasi Sungai Buaya dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, diharapkan risiko banjir di wilayah Kaltara dapat diminimalkan. **(dkisp)**



SP4N-LAPOR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang SP4N-LAPOR, Selasa (12/9/2023).

## Gandeng Mahasiswa, Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Kaltara Sosialisasi SP4N-LAPOR!

**TARAKAN** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), Selasa (12/9/2023).

Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara berkolaborasi dalam inisiasi sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) juga turut hadir sebagai salah satu leading sector dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kaltara.

Sosialisasi yang bertajuk "SP4N-LAPOR! Goes to Campus" dibuka oleh Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P.,

dengan kehadiran Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.

Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, menyambut baik kegiatan ini karena diyakini bahwa mahasiswa pasti memiliki keluhan terhadap pelayanan yang ada di kampus.

"Rekan-rekan mahasiswa yang malu atau takut mengadukan pelayanan kampus, bisa melaporkan melalui aplikasi LAPOR! ini," kata Adri Patton kepada mahasiswa.

Syahrullah Mursalin mengapresiasi terobosan kegiatan yang menyasar kaum intelektual sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, diungkapkan bahwa hingga September 2023, telah tercatat 14 aduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!.

"Hanya ada 14 aduan yang masuk

ke Kaltara melalui aplikasi ini. Jumlah ini kurang bisa menggambarkan kondisi pelayanan publik di Kaltara," ucap Syahrullah Mursalin.

Lanjutnya, Syahrullah berharap agar mahasiswa dapat aktif mengawasi proses pelayanan publik di Kaltara, dengan harapan bahwa partisipasi mereka akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan menuju arah yang lebih baik.

"Kita berharap kawan-kawan mahasiswa tetap mengawasi pelayanan publik yang ada, kalau ada pelayanan yang kurang bagus bisa diadukan melalui aplikasi LAPOR!," tutup Syahrullah sebelum membuka kegiatan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini Ombudsman RI Kaltara juga membuka gerai pelaporan dan konsultasi untuk mahasiswa UBT sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mengawasi pelayanan publik di Kaltara. (dkisp)



YAHYA/MEDIA KALTIM

Sekda Bontang, Aji Erlynawati saat pelaksanaan Bimtek implementasi SKA.

## Bimtek SKA, Upaya Peningkatan Perdagangan Ekspor

**BONTANG** – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Bontang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait implementasi penertiban dan pemanfaatan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) bagi barang-barang ekspor pada Selasa (12/9/2023) di hotel Bintang Sintuk.

Sekretaris Diskopukmp, Alfrita Junain Sande mengatakan untuk meningkatkan perdagangan perlu adanya kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk memberikan pengetahuan kepada beberapa perusahaan sebagai pelaku ekspor asal barang-barang.

“Suatu ketentuan administrasi yang diatur oleh kelompok negara mengenai asal barang yang ditentukan dengan surat keterangan asal

(SKA),” kata Alfrita.

Ia menambahkan SKA merupakan dokumen yang disertakan untuk barang dari Indonesia yang ditujukan pada negara-negara tujuan ekspor. “SKA merupakan surat yang membuktikan bahwa barang-barang atau hasil barang berasal dari Indonesia atau diolah di Indonesia,” katanya.

Sementara itu Sekda Bontang, Aji Erlynawati mengatakan sebagai instansi yang mengeluarkan SKA di wilayah Kalimantan Timur, DiskopUKMP juga mengeluarkan SKA bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah sekitar Kota Bontang seperti wilayah Kutim.

“Ketika berbicara mengenai barang ekspor bukan hanya berbicara mengenai nama perusahaan eksportir atau kota tempat asal barang diproduksi, tetapi menyangkut hubungan dagang antar negara,” kata Aji

Erlynawati saat membuka kegiatan, Selasa (12/9/2023).

Aji mengharapkan agar perusahaan-perusahaan yang menggunakan formulir SKA di Disko UKMP agar menjaga prosedur penertiban SKA sesuai dengan regulasi yang ditentukan.

“Saya yakin perusahaan-perusahaan besar di Bontang akan tertib dan taat dalam melaksanakan aturan yang ada,” jelasnya.

“Saya yakin optimis dalam pelaksanaan Bimtek yang berhubungan dengan implementasi penerbitan SKA ekspor agar berjalan dengan peningkatan arah kebijakan pemerintah dalam ekspor,” pungkasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari



YUSVA ALAM

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina saat diwawancara awak media usai pimpin RDP.

## Amir Tosina Geram! Pemkot Pakai Lahan di BSD untuk Buang Limbah Tapi Belum Dibebaskan

**BONTANG** - Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina terlihat geram dan dengan tegas meminta lahan yang dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah di Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai agar ditutup.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bontang bersama para pemilik lahan dan OPD terkait. RDP terkait Lahan Pemakaman Bontang Barat, Lahan RTH BSD dan Lahan RTH di Jalan Brokoli Kelurahan Gunung Elai, di Ruang Rapat Lantai II, Sekretariat DPRD, Senin (11/9/2023)

Menurut Atos sapaannya, lahan milik warga bernama Hariadi tersebut sudah sejak lama digunakan untuk pembuangan limbah saluran rumah tangga oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Namun, hingga saat ini urung membebaskan lahan tersebut.

Kondisi ini membuatnya geram.

Menurutnya, pemerintah hanya berjanji-janji saja dan tidak segera menindaklanjuti penyelesaian lahan tersebut.

"Tutup saja lahan itu. Malu kita ini, bisa-bisanya pemerintah pakai lahan warga sudah sekian tahun lamanya, tapi sampai sekarang belum juga dibebaskan. Harusnya kalau sudah pakai itu lahan, ya diselesaikan," serunya dengan nada kesal.

Luas lahan itu diungkapkannya, seluas 4.300 meter persegi. Ia pun mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan soal lahan tersebut. Pun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengaku belum ada instruksi dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti lahan tersebut.

"Tadi saat DLH ditanya ternyata gak nyambung, perwakilan DLH tidak tahu soal lahan itu. Berarti ini pemerintah cuman janji-janji saja. Padahal warga mengadukan, sudah datang wali kota juga. Jawabannya sudah di-

anggarkan, padahal belum ada sama sekali tindak lanjutnya," bebarnya.

Pihaknya pun sudah sidak di lahan tersebut. Terlihat lahan itu sudah dimanfaatkan atas permintaan pemerintah. "Saya pikir sudah selesai masalah lahan ini, karena sudah cukup lama. Ternyata pemerintah belum juga menyelesaikan. Makanya saya minta tutup saja itu biar pemerintah tahu bahwa ada hak orang lain. Enggak boleh menguasai itu," tandasnya.

Hariadi, pemilik lahan mengungkapkan, lahan miliknya itu sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah sejak lama. Ia pun sudah beberapa kali mengikuti RDP untuk penyelesaian masalah lahan yang digunakan pemerintah tersebut. Namun sampai sekarang belum ada kabar dan kejelasan soal pembebasan lahan itu.

"Saya sudah ikut RDP tiga kali. Menghadap wali kota secara resmi sekali. Tapi belum ada respon dari pemerintah," bebarnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Rapat Pembahasan Raperda Retribusi dan Pajak Daerah di Gedung DPRD, Senin (11/9/2023).

## Komisi II Lanjutkan Pembahasan Raperda Retribusi dan Pajak Daerah

**BONTANG** - Komisi II DPRD Bontang kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (11/9/2023).

Rapat pembahasan digelar di Gedung DPRD Bontang, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam.

Dikatakan Rustam, Raperda ini merupakan aturan yang disatukan menyesuaikan dengan regulasi atau Undang-Undang (UU) Omnibus Law. Mencakup berbagai isu, topik, atau hukum untuk semua.

"Raperda pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instruksi dari pusat," ujarnya.

Rustam mengharapkan pembahasan ini segera selesai, agar dapat

disahkan dan diberlakukan. Sebab akan berdampak ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Harus cepat selesai. Kalau tidak cepat selesai akan berdampak ke PAD. Karena pemerintah tidak bisa menarik pajak dan retribusi," timpalnya.

Saat ini telah masuk tahapan membahas besaran tarif atau nilai retribusi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang harus segera ditetapkan atau diselaraskan. Jika ada kenaikan satu rupiah akan dibahas dan disepakati bersama.

"Rupanya instruksi dari pemerintah pusat ini sudah lama. Di Sleman Jogjakarta saja sudah disahkan. Gak tahu kenapa di Bontang ini lambat instruksinya. Makanya kami panggil

semua OPD untuk tanyakan apa saja yang ada kenaikan," bebernya.

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati berharap Raperda ini bisa segera terealisasi. Terutama ketika ada kenaikan nilai soal retribusi tersebut bisa memberi alasan atau penjelasan.

"Semoga semua berjalan lancar sesuai yang kita harapkan untuk menambah PAD. Seperti kita tahu PAD kita sangat kecil dan bisa dikatakan belum mandiri secara fiskal. Kalau pun ada naik dan penurunan nilai yang akan diberlakukan, bisa diberikan alasan-alasannya, sehingga bisa diterima semua pihak," imbuhnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Kunjungan DPRD bersama OPD terkait ke lokasi serangan buaya di Kelurahan Guntung.

## Cegah Serangan ke Warga Terulang, Legislatif Setuju Buaya Masuk Pemukiman Direlokasi

**BONTANG** - Unsur pimpinan bersama Komisi I dan III DPRD Bontang dan OPD terkait mengunjungi lokasi kasus warga digigit buaya, serta rumah korban di Kelurahan Guntung, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, pihaknya sepakat apabila buaya yang masuk di pemukiman warga harus direlokasi.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, sering masuknya buaya ke pemukiman warga cukup berbahaya, lantaran banyak warga yang harus

melaut untuk mencari nafkah.

"Ini demi keselamatan warga juga. Buaya-buaya yang masuk di pemukiman itu harus direlokasi," tegasnya.

Pasca menengok ke lokasi kejadian, rombongan DPRD bersama OPD beralih ke rumah korban bernama Fitri.

"Alhamdulillah, korban sudah melewati masa kritisnya. Semoga bisa segera kembali pulih. Kami juga miris dan prihatin melihat kondisinya," ucapnya

Sementara itu, suami korban Zulkifli mengatakan, bahwa yang menerkam sang istri beberapa waktu lalu ialah Buaya Riska.

"Saya yakin dan ingat betul kalau itu Buaya Riska yang sering datang ke pemukiman," sebutnya.

Diketahui, pada akhir Agustus lalu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sudah merelokasi buaya ukuran 3 meter yang masuk ke pemukiman warga. (al/adv)



ADV DPRD BPP

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Ryan Desyanto

## Gandeng UGM, Dewan Bahas Kajian Museum Sejarah Balikpapan

**BALIKPAPAN** - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi IV beberapa waktu lalu telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) membahas kajian bersama Universitas Gajah Mada (UGM) terkait Museum Sejarah Kota Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Ryan Desyanto mengatakan, usai dilakukannya FGD tersebut diharapkan Kota Balikpapan segera dapat dibangun museum sejarah setelah kemerdekaan, di mana terdapat sejarah terbentuknya Kota Balikpapan dan terbentuknya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Mudah-mudahan di tiga generasi ini bisa dirumuskan oleh teman-

teman dari kajian bersama UGM. Ini juga merupakan usulan dari Komisi IV. Semoga bisa dilaksanakan dan menjadi Perda," ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Doris menyampaikan, rencana pembangunan museum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda di Kota Balikpapan. Karena banyak sekali situs-situs sejarah yang hilang, seperti di kawasan Dahor, Balikpapan Barat yang saat ini sudah diubah bangunannya menjadi apartemen. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari sejarah Kota Balikpapan.

"Karena memang kita kurang konsen terkait pelestarian cagar budaya.

Nanti nama Perdanya itu kemungkinan Perda Museum atau Pelestarian Cagar Budaya. Nanti teman-teman dari Bapemperda yang merumuskan," jelasnya.

Doris berharap, semoga museum ini dapat segera ditentukan lokasinya dan dibangun. Tentunya ini juga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Balikpapan.

"Kan kalau menarik, pasti dikunjungi. Kalau sudah begitu bisa menumbuhkan ekonomi Balikpapan juga," tutupnya. (adv)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



ADY/RADAR KUKAR

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

## Anggaran Fantastis, Ketua DPRD Kukar Minta Disdikbud Maksimalkan Dana Pendidikan

**TENGGARONG** - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu meringankan beban orang tua murid pada APBD-P 2023.

Bukan tanpa alasan, harapan ini lahir setelah pada bulan Agustus lalu, DPRD Kukar bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menetapkan APBD-P Kukar menjadi Rp 11,8 triliun.

Angka ini terbilang sangat fantastis, bahkan meningkat hingga Rp 4 triliun. Bila dibandingkan dengan

APBD murni yang berada diangka Rp 7,8 triliun. "Ini kan anggaran kita terbilang sangat besar dan alokasi untuk pendidikan itu diatur dalam mandatory spending 20 persen dari APBD. Jadi sedikit banyaknya ini harus bisa dimanfaatkan juga untuk meringankan beban orang tua murid," tutur Rasid, Selasa (11/9/2023).

Apalagi, beberapa waktu lalu sempat ada beberapa kelompok masyarakat yang menyuarakan agar pemerintah mengadakan seragam sekolah gratis. Rasid menilai hal ini sangat mungkin untuk direalisasikan oleh Disdikbud Kukar.

"Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi saya kira ini masih sangat memungkinkan untuk direalisasikan," tambahnya.

Oleh karena itu, Rasid berharap Disdikbud Kukar bisa merencanakan kegiatan dengan tepat sasaran. Khususnya yang berkaitan dengan membantu meringankan beban para orang tua murid. "Salah satunya seperti seragam gratis, atau mungkin yang lain," pungkasnya. (adv)

Penulis : Ady Wahyudi  
Editor : Muhammad Rafi'i



RAFI'/MEDIA KALTIM

Suasana Sidang Paripurna DPRD Kukar, membahas 2 usulan Raperda diluar Propemperda.

## DPRD-Pemkab Kukar Bahas 2 Raperda Usulan di Luar Propemperda

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara menggelar Rapat Paripurna, terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Rapat yang digelar pada Selasa (12/9/2023), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono. Sementara dari Pemkab Kukar, dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Ahmad Taufik Hidayat.

Sebanyak dua usulan Raperda yang

diusulkan. Yakni masing-masing Raperda berkaitan tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Sarang Burung Walet, serta Raperda tentang Ketertiban Umum yang menjadi usulan resmi yang dilonarkan oleh Pemkab Kukar.

"Kenapa Raperda walet ini menjadi pembahasan yang sangat intens di DPRD Kukar maupun dinasterkait, karena walet merupakan salah satu PAD kita yang harus dikelola dengan baik," ujar Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Selain menjadi PAD yang cukup menjanjikan bagi Kukar, namun kenyataan di lapangan harga di tingkat

petani yang sangat jomplang. Ini menjadi upaya DPRD Kukar dan Pemkab Kukar, memastikan para petani mendapatkan untung yang sesuai. Maka dari itu, Pemkab Kukar dan DPRD Kukar sepakat untuk segera membahas dan mengesahkannya menjadi peraturan daerah (perda).

"Perda ini bisa memberikan efek yang positif bagi masyarakat kita, terutama para petaninya," tutup Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'

Editor : Nicha Ratnasari

**Koran DIGITAL**  
MEDIA  
KALTIM.com  
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033

media\_kaltim
 mediakaltimdotcom
 mediakaltim.com
 media kaltim



# Disperkim Kukar Siapkan Rp 68,5 Miliar untuk Infrastruktur SPAM di Desa-desa

**TENGGARONG** - Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang terus dikebut oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin seperti yang tercantum dalam program dedikasi Kukar Idaman.

Melalui Kabid Kesehatan Lingkungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, Supriyadi Agus, sepanjang 2023 akan mengerjakan 60 kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan nominal pengerjaan sebesar Rp 68,5 miliar.

Dari anggaran tersebut, Supriyadi menyebut kisaran Rp 19 miliar dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur SPAM. Sedangkan Rp 49,5 miliar sisanya untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM yang sudah terbangun.

Supriyadi merincikan, ada 17 unit infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun di 8 Kecamatan di Kukar. Sementara 24 kegiatan peningkatan SPAM yang sudah terbangun dan 19 kegiatan perluasan infrastruktur SPAM.

"Program pembangunan SPAM bapak bupati (Edi Damansyah) di desa-desa ini akan habis di 2024, tinggal dusun-dusun saja lagi," ujar Supriyadi pada mediakaltim.com, Selasa (12/9/2023).

Peningkatan SPAM yang dimaksud oleh Supriyadi, berupa penambahan kapasitas infrastruktur SPAM yang terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Seperti penambahan kapasitas bak penampungan airnya. Mengubah penampungan air yang semula berupa tandon-tandon, menjadi Water Treatment Plant (WTP).

Sementara untuk kegiatan perluasan infrastruktur SPAM, lebih kepada penambahan jumlah sambungan rumah penerima manfaat. Disesuaikan dengan jumlah sambungan yang terus bertambah di lokasi tersebut.



## Peningkatan Akses Air Bersih di Kukar

- **Anggaran SPAM**
  - Anggaran total untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Rp 68,5 miliar.
  - Rp 19 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPAM.
  - Rp 49,5 miliar digunakan untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM yang sudah ada.
- **Lokasi Proyek**
  - Terdapat 17 unit infrastruktur SPAM yang akan dibangun di 8 Kecamatan di Kukar.
  - 24 kegiatan peningkatan SPAM yang sudah ada.
  - 19 kegiatan perluasan infrastruktur SPAM.
- **Penyelesaian Proyek**
  - Program pembangunan SPAM di desa-desa diharapkan selesai pada tahun 2024.

- **Peningkatan Kapasitas SPAM**
  - Peningkatan SPAM mencakup penambahan kapasitas bak penampungan air.
  - Mengubah penampungan air yang semula berupa tandon-tandon menjadi Water Treatment Plant (WTP).
- **Perluasan Jaringan**
  - Perluasan infrastruktur SPAM melibatkan penambahan jumlah sambungan rumah penerima manfaat sesuai dengan pertumbuhan di lokasi tersebut.
- **Manajemen SPAM**
  - SPAM yang dibangun akan dikelola secara mandiri oleh desa penerima manfaat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - Masyarakat akan membayar iuran bulanan untuk pemeliharaan.
- **Target RPJMD**
  - Target RPJMD Kukar adalah menyelesaikan pembangunan SPAM di 56 desa pada akhir 2023.



Kebutuhan dasar air bersih menjadi prioritas oleh Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam Program **Dedikasi Kukar Idaman**.

SUMBER: Bidang Kesehatan Lingkungan Disperkim Kukar | FOTO: RETNAWA | GRAFIS: AKTO | EDITOR: AGUS SRIANTO

Ke depannya, SPAM yang dibangun akan dikelola secara mandiri oleh desa penerima manfaat. Yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mulai dari perawatan hingga iuran perbulannya. Namun sebelumnya akan dilatih dalam proses pengelolaannya.

“Sangat maksimal dirasakan masyarakat, nanti akan dikelola oleh BUMDes dan pembiayaan akan dibahas mereka, dengan sistem pembayaran (pemakaian) tiap bulan,” lanjutnya.

Terkait target Disperkim Kukar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026, diklaim tuntas pada akhir 2023 ini. Yakni menyelesaikan pembangunan SPAM di 56 desa dalam waktu 2 tahun. Nantinya pada tahun 2024 mendatang lebih kepada fokus pembenahan SPAM yang sudah dibangun.

“Pembangunan tidak ada kendala, karena sifatnya teknis, yang terkendala ini SDM yang mengelola saja lagi, butuh pelatihan,” tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kabid Penyehatan Lingkungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, Supriyadi Agus.



LET'S GO  
BUDIDAYA



## SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

\* TOYOTA MOTOR OIL

# Khusus Taxi Online & Travel







Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Drusan Toyota lebih mudah!

Bontang



Perjanjian kerjasama DPKD Kaltim dan DPKD Kaltara.

## DPKD Kaltim dan Kaltara Saling Perkuat Kerjasama Peningkatan Layanan dan Informasi

**SAMARINDA** - Untuk memperkuat komitmen pengembangan Centre Of Excellent Layanan Perpustakaan Dan Informasi Budaya Lokal Kalimantan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), bersama DPKD Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Ir. Yosua Batara Payangan, ST, M.Si, dan Kepala Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama, DPK Kaltim Dra. Hj. E. Mustika Wati, MM. Di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan

Utara pada 7 September 2023 lalu.

"Perjanjian sebagai bentuk tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya, pada Juli kemarin, pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Centre of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno di Aula DPK Kutai Kartanegara," ungkap Mustika kepada [Mediakaltim.com](http://Mediakaltim.com).

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan bukti komitmen DPKD Kaltim untuk melakukan kerjasama secara tertulis dengan DPKD Kalimantan Utara.

"Ini tindak lanjut dari pertemuan waktu itu di Kukar, kita buat perjanjian dengan seluruh DPKD Se-Kalimantan," ujarnya.

Diketahui pada Juli lalu, seluruh DPKD Se-Kalimantan melakukan Pertemuan di Kukar, pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Centre of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno di Aula DPKD Kutai Kartanegara. Dengan menghasilkan penandatanganan kerjasama antara lima provinsi di Pulau Borneo dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan warisan budaya melalui naskah kuno di Kalimantan. (adv)

Pewarta : Hanafi  
Editor : Nicha Ratnasari



HUMAS DPKD KALTIM

Deputi Bidang Konservasi Kearsipan, Dr.Kandar (kiri bawah) Kepala DPK Kaltim, Drs. Muhammad Syafranuddin,MM (Kanan bawah). Saat sesi foto bersama acara Bimbingan Bimtek Risk Assesment di Aula PDKD Kaltim.

## Arsip dan Naskah Kuno Harus Dipelihara sesuai Standar

**SAMARINDA** - Dalam pemeliharaan naskah kuno harus dilakukan sesuai standar. Palsalnya, jika itu diabaikan maka akan berbahaya dan merusak arsip tersebut. Jika rusak, maka sejarahpun akan ikut menghilang.

Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Konservasi Kearsipan, Dr.Kandar, MAP, beberapa hari yang lalu saat menyampaikan materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Risk Assesment di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (PDKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kalau naskah arsip hilang atau rusak sejarah juga rusak," jelas Kandar.

Kandar menyebutkan Penilaian Risiko atau RiskAssesment, adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan.

"Oleh sebab itu kita harus tahu cara mendiagnosis arsip akan dirawat dengan metode apa, karena perhatian terhadap naskah kuno harus dipelihara sesuai standar," paparnya.

Menyetujui pemaparan Kandar, Kepala DPK Kaltim, Drs. Muhammad Syafranuddin,MM berterima kasih kepada ANRI, karena menurutnya naskah kuno dan arsip merupakan aset yang perlu terjaga.

"Terima kasih kepada ANRI, sekali lagi naskah kuno dan arsip merupakan aset yang perlu kita jaga bersama keberadaannya," ucap pria yang akrab disapa Ivan tersebut. (adv)





Rangkaian kegiatan kunjungan BPSDM DKI Jakarta

## Kunjungi BPSDM Kaltim, Peserta PKA BPSDM DKI Jakarta Pelajari Inovasi Pelayanan Administrasi

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menjamu kunjungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (12/8/2023) sore. Kunjungan tersebut dalam rangka studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ASN DKI Jakarta.

Dalam jamuan tersebut, hadir mewakili Gubernur Kaltim Setda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Kabid PKMF Rina Kusharyanti dan Pimpinan Rumah Sakit Dr Kanujoso Balikpapan. Sedangkan dari pihak BPSDM DKI Jakarta hadir Kepala Bidang Pengembangan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Indang Murniningsih beserta rombongan peserta PKA

yang berjumlah 33 orang.

Dalam sambutannya, Indang mengatakan tujuan dari datangnya peserta PKA BPSDM DKI Jakarta ke Kaltim adalah untuk belajar inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Pemprov Kaltim.

"Kami senang memilih Kaltim, karena banyak inovasi yang perlu digali di sini, dua locus Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Simpator, yang sempat menjadi top inovator 2022. Kami juga mau melihat inovasi e-Samsat dalam genggaman, inovasi sidokter yang dikembangkan RS Kanujoso Balikpapan, banyak yang perlu digali agar nanti banyak ilmu yang bisa dibawa pulang ke Jakarta," akunya.

Selain menambah wawasan dari daerah lain, Indang mengatakan tujuan datangnya peserta PKA langsung ke lokasi agar dapat men-

gidentifikasi lapangan. "Tujuan ke lapangan agar mampu melihat perubahan secara langsung," ujarnya.

"Oleh sebab Ibu Sekda dan Ibu Kepala BPSDM bisa berkenan menerima kami dalam kerjasama dalam kami menggali ilmu di sini," tambahnya.

Sementara itu, Setda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni, mengucapkan selamat datang kepada Ibu Indang dan rombongan PKA.

"Selamat datang Ibu Indang dan rombongan, nanti kalau ada waktu kita bisa keliling sungai Mahakam naik kapal di sini untuk menikmati panorama sungai Mahakam dan beserta kuliner ikan sungainya," ucap Sri. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi

## BPSDM Kaltim Gelar Orientasi bagi 2.330 PPPK

**SAMARINDA** - Berdasarkan informasi yang dirilis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), saat ini tengah menjalankan Orientasi untuk 2330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung hingga 12 September 2023 ini.

Para peserta yang ikut dalam kegiatan orientasi ini, merupakan para pegawai berstatus PPPK kelas Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim.

“Untuk PPPK kelas Provinsi yang

diangkat oleh BKD tahun 2022, kita sudah orientasikan semuanya di tahun 2023 ini. Untuk kelas kabupaten/kota juga sudah sebagian. Sampai Desember nanti tinggal beberapa angkatan Kabupaten/kota saja lagi belum orientasi,” ungkap Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, saat dikunjungi MediaKaltim.com di kantornya Selasa (12/9/2023).

Nina Dewi mengatakan, yang sudah ikut PPPK saat ini mayoritas berprofesi sebagai guru.

“Dalam data tersebut mayoritas adalah berprofesi sebagai guru,

selebihnya adalah tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya,” ujarnya.

Nina Dewi juga menekankan, untuk semua PPPK yang telah menjalani orientasi di BPSDM Kaltim, agar menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, agar mampu bersaing serta berkualitas.

“Menjadi PPPK yang baik, harus memiliki sikap disiplin, inovatif, kreatif dan bekerja ikhlas,” tutupnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



# Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Kaltim untuk Tekan Angka Stunting

**SAMARINDA** – Target menurunkan angka stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi benang merah dalam pelaksanaan Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim di Hotel Ibis, Senin (11/9/2023).

Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita (end-user) mengacu pada pedoman sejak Tahun 2019.

Kepala Dinkes Kaltim Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp. KJ, M. Kes, MARS, pada momen tersebut menekankan bahwa pada 2020 dan 2021, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan revisi pada pedoman dan buku bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Modul Gizi Buruk. Untuk memberikan tatalaksana balita sakit secara komprehensif sesuai pedoman tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas bagi fasilitator dan tenaga kesehatan pelayanan kesehatan pada anak di Puskesmas agar sesuai dengan standar.

“Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita kurang gizi (underweight) dari 16,6% menjadi 14,7%, penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 11,6% menjadi 7,5%, penurunan prevalensi balita gemuk (overweight) dari 12,6% menjadi 9,4%, namun terjadi peningkatan



DOK. DINKES KALTIM

**Peserta Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim.**

prevalensi balita pendek dari 27,6 % menjadi 29,4%,” paparnya.

Sementara itu, pada Riskesdas 2018, ia menunjukkan capaian kinerja gizi yang masih kurang optimal seperti proporsi BBLR pada anak 0 - 59 bulan sebesar 7,1%, proporsi risiko KEK pada ibu hamil sebesar 11,5%, persentase IMD pada bayi dan anak usia 0-23 bulan sebesar 66,1%, persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 55,2%, dan persentase balita yang mendapat vitamin A mencapai 55,7%.

“Hasil Survei Status Gizi Balita tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan prevalensi stunting mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,1% dari tahun 2021 sebesar 26,4%. Prevalensi gizi kurang (wasting) dari 7,1% menjadi 7,7%. Prevalensi underweight dari 17,0% menjadi 17,1%. Adanya peningkatan masalah gizi untuk 3 indikator,” sebutnya.

Menurutnya, balita gizi buruk masih ditemukan di beberapa tempat, baik dalam bentuk kwashiorkor, ma-

rasmus, atau marasmus kwashiorkor. Hal ini merupakan masalah yang perlu dicegah dan ditanggulangi bersama. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan secara profesional sesuai kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita agar tenaga kesehatan mampu melakukan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita.

“Kami menyambut baik diadakannya kegiatan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit yang nantinya diharapkan setelah kegiatan ini peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini,” harapnya. (RLS/RS1)

Editor: Adhi Abdhian



## Dinkes Kaltim Target Turunkan Stunting

SAMARINDA – Pelatihan dan Tata Laksana Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Timur 2023 Angkatan II yang digelar 4 - 9 September 2023, menjadi momen penting bagaimana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyeriusi penanganan Stunting di Bumi Etam.

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kaltim Dr.dr.H.Jaya Muallimin, Sp.KJ,M.Kes,MARS, menjelaskan, sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target indikator pembangunan kesehatan adalah menurunkan stunting menjadi 14% dan menjadi 7% pada tahun 2024.

Secara luas ia menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita (triple burden) yaitu stunting dan wasting, overweight, serta defisiensi zat gizi mikro (Global Nutrition Report, 2018).

"Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 terdapat 10,2% balita wasting

atau kasus gizi kurang, 3,5% di antaranya severe wasting atau gizi buruk," sebutnya.

Ditambahkan, tingkat kematian dan kesakitan anak dengan gizi buruk lebih tinggi dibanding anak dengan gizi baik. Menurutnya, perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang.

"Kasus gizi buruk masih banyak ditemui di masyarakat, namun kasus yang dilaporkan dan yang mendapat perawatan masih rendah," katanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan antara lain karena, terbatasnya akses layanan kesehatan, belum banyak fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan balita sakit secara integratif sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi.

Kemudian, ketidakmampuan pemberi layanan dalam tata laksana gizi buruk, dan pelaporan yang tidak lengkap.

"Terakhir, dikarenakan rendahnya kesadaran keluarga untuk membawa balita gizi buruk ke tempat pelayanan kesehatan," jelasnya.

Untuk itu Dinkes tak tinggal diam. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

"Serta adanya program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita atau end user yang mengacu pada pedoman sejak tahun 2019," paparnya. (rls/adv)

Editor : Adhi Abdhian



# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From <sup>Rp</sup>15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)



## Akselerasi Program TP PKK

**JAKARTA** - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau, Sri Aslinda Gamalis, bersama ketua TP PKK Se Indonesia menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) tahun 2023 di Ballroom Bidakara Jakarta, Senin (11/9/2023). Rakornas dibuka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dan turut dihadiri Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Rakornas 2023 mengusung tema terus berkontribusi untuk Indonesia maju.

Gelaran Rakornas ini fokus pada upaya akselerasi program PKK untuk mencapai rencana induk gerakan PKK 2021-2024. Selain dihadiri ketua TP PKK Provinsi, serta Ketua TP PKK

kabupaten dan kota se Indonesia. Rakornas juga diikuti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi se Indonesia.

Ketua TP PKK Berau, Sri Aslinda Gamalis, usai mengikuti rakornas, mengungkapkan beberapa point penting yang telah dipaparkan dari ketua umum kementerian/lembaga dalam mensinergikan program PKK. Rakornas ini disebutkannya bertujuan agar tersosialisasikannya kebijakan kelembagaan dan program kerja PKK hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara operasional kepada daerah. "kegiatan ini juga untuk mengintegrasikan perencanaan

dan pelaksanaan 10 program Pokok PKK, serta terwujudnya hubungan yang harmonis antara TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota," ungkapnya.

TP PKK Berau, disampaikannya memberikan memiliki komitmen dalam menjalankan program dengan mengoptimalkan peran kader hingga ke tingkat kelurahan, kampung dan dasawisma. Tentu dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja PKK. "Tentu apa yang menjadi harapan PKK pusat, menjadi komitmen dan perhatian kita di daerah dalam menjalankan 10 program pokok PKK," tandasnya. **(RN/Prokopim/dez)**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

## Hasil Panen Minim, DPRD Berau Dorong Pemerintah Adakan Pupuk Subsidi

**TANJUNG REDEB** - Sulitnya para petani di Bumi Batiwakkal memperoleh pupuk menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menuturkan, para petani juga mengeluhkan soal mahalannya harga pupuk. Sebab dapat berimbas terhadap hasil panen mereka.

Diungkapkannya, sebagai wakil rakyat dirinya menyaksikan langsung kondisi di lapangan bagaimana petani mengeluh terkait hal tersebut. Ia sendiri berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan para petani.

"Dari hasil reses banyak warga mengeluh soal langkanya pupuk belum lagi harganya yang mahal. Pasti berdampak pada produksi pertani-

an," katanya, Selasa (12/9/2023).

Terlebih, dari data yang ada pada 2021-2022 terdapat 38,70 ton padi per hektare dan sampai di tahun 2022-2023 terjadi penurunan menjadi 33,90 ton per hektare.

Pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan para petani. Seperti, koordinasi dengan instansi terkait hingga menggunakan mekanisme dana aspirasi miliknya. Yang tentunya harus melewati berbagai mekanisme yang ada.

"Namun saya pastikan, saya akan menindaklanjuti permasalahan ini hingga tuntas," tegasnya.

Ia meminta, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus

terkait merosotnya jumlah produksi panen petani tersebut. Baik itu berupa pupuk bersubsidi ataupun non subsidi yang mudah didapatkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat membuat terobosan agar memudahkan petani mendapatkan pupuk. Serta bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan pupuk bersubsidi segera.

"Karena memang salah satu penghambat turunnya produksi padi dari petani, yaitu susahnyanya mendapatkan pupuk," pungkasnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza  
Editor: Dezwan



Rumah jabatan Bupati Berau bakal dilakukan rehabilitasi senilai Rp 677 juta.

## Rehab Rumah Jabatan Bupati Berau Telan Rp 677 Juta, Saga: Pekerjaan Harus Maksimal

**TANJUNG REDEB** - Anggaran sebesar Rp 677 Juta digelontorkan untuk kerusakan minor rumah jabatan Bupati Berau. Hal itu pun direspons positif oleh Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga. Diketahui, perbaikan dilakukan untuk memperbaiki atap yang bocor dan kamar mandi laki-laki.

Saga menuturkan, perbaikan tersebut memang sudah direncanakan. Bahkan usulan perbaikan rumah jabatan Bupati Berau merupakan salah satu inisiasinya. Terlebih, rehabilitasi terakhir dilakukan 4 tahun silam.

Dia membeberkan, sebelumnya anggaran untuk rehabilitasi sekisar Rp 200 juta. Namun, dinilainya den-

gan dana sebesar itu pekerjaan tidak akan maksimal.

"Maka dari itu saya mendorong agar alokasi anggaran untuk rehab rumah jabatan bupati dinaikkan. Apalagi rehabilitasi ini tidak dilakukan setiap tahun, tetapi sesuai kondisi, seperti rumah dinas itu. Memang saya sarankan di rehab lagi, karena belum maksimal pada saat itu Rp 200 jutaan," jelasnya, Selasa (12/9/2023).

Dengan anggaran yang cukup besar, kata Saga, diharapkan pengerjaan dapat maksimal, sehingga tidak lagi diusulkan dalam tahun-tahun berikutnya.

"Kita harapkan dengan yang biaya besar untuk rehab ini dapat maksi-

mal, jangan hanya seadanya. Jadi kita minta kalau biaya besar dimaksimalkan," tegasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai kemampuan anggaran mencukupi. Terlebih APBD Berau pada tahun 2023 ini mencapai Rp 5,1 triliun.

"Berkaitan anggaran kita, wajar saja karena anggaran kita murni dan perubahan totalnya mencapai sekitar Rp 5 triliun. Dengan dana besar rehabnya jangan asal-asalan," tandasnya. **(mnz/dez)**

*Pewarta: Amnil Izza  
Editor: Dezwan*



Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, AKP Hendri Saragi saat menunjukkan TKP bayi 1,5 tahun terjatuh.

## Polisi Amankan Pengasuh Balita 1,5 Tahun yang Tewas di Sepinggian

**BALIKPAPAN** - Polsek Balikpapan Selatan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian bayi berusia 1,5 tahun berinisial T1 di Jalan Marsma R Iswahyudi RT 10 Kelurahan Sepinggian Raya, Balikpapan Selatan.

Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, AKP Hendri Saragi mengatakan, saat ini Polsek Balikpapan Selatan pun telah menahan pengasuh bayi berinisial NK (26) yang menyebabkan kematian bayi tersebut.

"Saat ini kita masih mintai keterangan pengasuhnya. Selain itu sejumlah saksi-saksi juga sudah kita mintai keterangan," ujarnya saat ditemui di Makpolsek Balikpapan Selatan, Se-

lasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Saragi menjelaskan, pihaknya saat ini juga masih menunggu hasil visum dan pemeriksaan lainnya dari jasad korban di RS Bhayangkari.

"Perkembangannya belum ada. Semalam baru divisum sama rumah sakit. Mungkin hasilnya bisa semingguan," jelasnya.

Terkait orang tua bayi yang meninggal, pihak kepolisian pun sudah berhasil menemukannya. Dan saat ini kondisinya masih emosional, karena mengetahui sang anak telah meninggal dunia.

"Jadi ibunya semalam sudah kita temui dan komunikasikan. Cuma ma-

sih sedikit emosi, karena anaknya kan meninggal," tambah Saragi.

Disinggung mengenai pengasuh yang membiarkan bayi tersebut meninggal dan baru dilaporkan sehari setelahnya, Saragi menjelaskan, jika saat itu pengasuhnya bingung, ketakutan dan tak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit.

"Pas kita tanya itu dia panik dan takut. Selain itu juga nggak punya uang mau bawa ke rumah saki. Makanya dia diam aja," tutup Saragi.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Nicha Ratnasari*



Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani menunjukkan tersangka dan barang bukti badik yang di gunakan tersangka.

## Sering Dimaki “Anjing”, Pria ini Tikam Rekan Kerja hingga Tewas

**BALIKPAPAN** - Polsek Balikpapan UtarabersamaJatanrasPoldaKaltim dan Polresta Balikpapan berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Km 18 tepatnya di RT 39 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara pada Senin (4/9/2023) sekitar pukul 11.20 Wita.

Pelaku berinisial SK (47) ditangkap tiga hari setelah kejadian di kawasan Km 39 RT 11 Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara di area perkebunan sawit milik saudaranya.

Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani mengatakan, korban dan pelaku adalah rekan kerja. Bahkan satu daerah yang berasal dari pulau Sulawesi. Namun, karena ucapan korban yang membuat sakit hati pelaku, maka terjadilah peristiwa naas tersebut.

“Motifnya pelaku ini sakit hati. Korban katanya sering mengatai kata-kata kasar yang membuat pelaku

sakit hati dan terjadilah perselisihan keduanya,” ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Kapolsek Balikpapan Utara menjelaskan, bahwa keduanya pernah berselisih paham juga. Namun keduanya telah didamaikan oleh pihak perusahaan.

“Sebelumnya mereka ini sudah pernah juga berselisih paham. Tapi didamaikan oleh perusahaan. Cuma kayanya ini belum tuntas dan berlanjut sampai kejadian itu,” jelasnya.

Saat kejadian pelaku SK menikam korban SH (46) sebanyak 6 kali. Yakni di bagian dada kanan, perut kiri, punggung kiri atas, punggung kiri bawah, paha kaki kiri, dan siku tangan kiri.

“Korban dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Ditubuh korban banyak terdapat luka tusuk dari benda tajam yakni badik,” tambah Bitab Riyani.

Sementara itu pelaku SK saat dimintai keterangannya mengaku sakit

hati lantaran sudah terlalu sering dikata-katai binatang oleh korban. Bahkan saat sebelum kejadian, ia sempat di pukul menggunakan benda tumpul di bagian kepalanya.

“Sering dibilangin aku ini babi lah, anjing lah, yang bikin emosi aku dibilangin kalau aku lahir dari binatang bukan manusia,” ujarnya.

SK yang sudah tersulut emosi pun langsung menikam SH secara brutal. Bahkan korban sempat lari, namun tetap dikejanya hingga korban tersungkur dan tak berdaya.

“Nggak tahu berapa kali saya tusuk. Saya emosi sudah. Pas dia sudah nggak bangun saya pergi,” jelasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi pun menyangkakan pasal 338 KUH Pidana terhadap pelaku. Dimana ancaman kurungan penjaranya hingga 7 tahun.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG

Beras di Pasar tradisional Rawa indah.

## Petani Jawa Gagal Panen, Harga Beras Makin Melonjak

**BONTANG** - Awal tahun 2023 lalu harga beras terus meningkat disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat menyambut hari-hari besar.

Namun pada awal Agustus lalu, harga beras ternyata kembali melonjak. Menurut salah satu supplier beras di pasar tradisional Rawa Indah menjelaskan kenaikan beras kali ini dinilai cukup tinggi.

"Sebelumnya harga beras 25 Kg sudah Rp 308 ribu sampai Rp 310 ribu, setelah Lebaran nggak turun, malah naik," Ungkap Nisa penjaga toko Supplier beras, Selasa (12/9/23).

Harga beras 25 Kg kini menca-

pai Rp 330 ribu hingga Rp 350 ribu, sementara itu untuk beras kiloan di supplier paling murah yakni Rp. 12.5 ribu.

Nisa menjelaskan lonjakan tersebut diakibatkan beras yang berada di pulau Jawa mengalami banyak yang gagal panen, sehingga petani beras harus mengambil beras dari pulau Sulawesi untuk kembali di kirim ke Kalimantan. "Karena gagal panen, yang di Jawa ambil beras ke Sulawesi, makanya naik sekali," ujarnya.

Salah satu penjual beras yang juga berada di pasar tradisional Rawa Indah, Ibu Andi mengeluh lantaran sejak awal tahun harga beras terus

meningkat. "Naik sekali harga beras, tapi memang katanya asli Sulawesi, saya juga ambil di supplier sebelah," jelasnya.

Untuk harga besar yang ia jual qkqn lebih mahal dari harga supplier, karena sudah naik sangat jauh, ia hanya mengambil untung sebanyak Rp. 2 ribu. Untuk pembelian beras diakui lebih banyak yang langsung ke supplier. "Ada saja yang beli pasti, karena kebutuhan sehari-hari, tapi karena naik kadang orang ke supplier," ungkapnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Bupati Kukar, Edi Damansyah, saat menerima penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik dari Kompas TV.

## Inovasi DiSAPA Mengantar Kukar Raih Penghargaan dari Kompas TV

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memahami betul cara memanfaatkan era keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pelayanan masyarakat di wilayah Kukar. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah melalui inovasi Program DiSAPA (Digitalisasi Pelayanan Publik).

Program DiSAPA ini telah diterapkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar. Dengan membangun situs web, semua informasi dan layanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam era keterbukaan saat ini.

Inovasi ini mendapat pengakuan tingkat nasional dengan menerima Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik dalam acara malam puncak perayaan HUT ke-12 Kompas TV yang bertajuk "Indonesia 12aya."

"Jadi semua informasi dan layanan

tersebut telah tersedia dalam format digital melalui program DiSAPA ini," ungkap Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Senin (11/9/2023) malam.

Penghargaan untuk keterbukaan informasi publik diberikan kepada lima daerah yang dinilai memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Edi Damansyah menerima Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik ini bersama dengan empat kepala daerah lainnya, yaitu Kabupaten Talaud, Kota Probolinggo, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Tapin.

Selain itu, Kompas TV juga memberikan empat penghargaan lainnya, seperti Apresiasi Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata kepada Kota Balikpapan, Kabu-

paten Jember, Kota Makassar, Kota Malang, dan Kabupaten Minahasa Utara. Serta Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal kepada Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Anugerah Apresiasi Daerah Peduli Penanganan Stunting dan Layak Anak diberikan kepada Kota Lampung, Kabupaten Blora, Kabupaten Jember, Kota Mojokerto, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Semarang. Terakhir, Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik diberikan kepada Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Marowali Utara, Kabupaten Puncak Papua, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Tangerang Selatan.

Penulis: Muhammad Rafi'i  
Editor: Agus Susanto



Pasutri siri ditangkap polisi.

## Pasutri Asal Batu Sopang Ditangkap, Miliki Sabu 5,94 Gram

PASER - Pasangan suami istri (Pasutri) siri asal Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, diamankan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Paser, Jumat (8/9/2023).

Pengamanan itu setelah pria berinisial A (36) dan perempuan L (33) kedapatan memiliki sabu sebesar 5,94 gram. Hal itu diketahui, setelah Aparat Penegak Hukum (APH) menggeledah rumah keduanya yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi menyatakan, penggeledahan itu dilakukan setelah pihaknya mendapati informasi dari masyarakat. Dari informasi itu, petugas

melakukan penyelidikan dan menangkap dugaan kasus tersebut.

"Kami lakukan penggeledahan dini hari tepatnya pukul 03.00 Wita di rumah yang kami dapati informasinya sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu," kata AKP Suradi saat diwawancarai di ruangannya, Selasa (12/9/2023).

Adapun sabu yang didapati dengan berbagai macam ukuran yang dikemas dalam 8 paket. Selain paket sabu, petugas juga menemukan 2 buah sendok takar, 1 unit timbangan digital, plastik klip serta uang tunai senilai Rp 1,5 juta yang turut dijadikan barang bukti.

"Ada juga tas selempang yang menyimpan barang bukti, 1 unit sepeda motor para pelaku dan 2 unit

telepon genggam yang kami juga amankan," tambah Suradi.

Suradi menyebut, saat penggeledahan petugas juga memanggil pihak Rukun Tetangga (RT) sebagai saksi mata. Keduanya diduga merupakan pengedar di kawasan setempat. Akibat perbuatannya, petugas menggiring para pelaku ke Polres Paser.

Kini para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti diamankan. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pewartu : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIA KALTIM GROUP

**Rapat evaluasi Pemkab PPU dan BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, Selasa (12/9/2023).**

## Program Bantuan BPJS Ketenagakerjaan di PPU Capai 6 Ribu Peserta

**PPU** - Bantuan jaminan kesehatan bagi pekerja rentan di Penajam Paser Utara (PPU) terus diperluas. Pada semester kedua tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kembali menjaminkan 5.000 peserta masuk dalam program tersebut.

Program Pemkab PPU ini diyakini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terungkap setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama semester pertama tahun 2023.

"Saat melakukan evaluasi terkait BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten PPU, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk unit-unit kerja yang beroperasi di Kabupaten PPU," ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, usai memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di PPU pada Selasa (12/9/2023).

Jaminan kesehatan ini diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Tohar menekankan pentingnya

melakukan evaluasi bersama di lapangan untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan konsistensi daerah terhadap jaminan ketenagakerjaan ini, baik dalam aspek kesehatan maupun hal lainnya.

"Saya berharap agar link (jaringan) BPJS Ketenagakerjaan dapat dimaksimalkan. Meskipun berbeda dalam cakupan tugas, tujuan kita satu, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran untuk 1.000 pekerja dalam APBD murni, dan kemudian menambahkannya menjadi 5.000 peserta dalam APBD perubahan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, Muhammad Fanani, menyatakan bahwa saat ini jumlah peserta program tersebut tersebar di empat kecamatan. Target bersama dengan pemerintah daerah adalah mencapai total sekitar 15 ribu peserta pada tahun 2024.

"Melihat perkembangan ini, kami

sangat mengapresiasi Pemda PPU atas inisiatif daerah yang sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di daerah ini," ungkapnya.

Selain program untuk pekerja rentan, Fanani juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam pembahasan untuk kerja sama terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi non-ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU.

"Kami telah melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemda PPU mengenai beberapa aspek, termasuk progres pelaksanaan jaminan kesehatan ketenagakerjaan di PPU," bebernya.

"Kami akan terus memberikan laporan berkala mengenai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan, yang telah dibayarkan, serta perkembangan klaimnya," tutupnya. (SBK)



Bupati PPU Hamdam menyerahkan stiker tanda pemasangan 100 SR ke warga Kerok Laut Penajam, Selasa (12/9/2023).

## Progres Perluasan Layanan Air Bersih Bantuan Australia Capai 80 Persen

PPU - Progres perluasan layanan air bersih di Kecamatan Penajam telah mencapai 80 persen. Target penyelesaian program bantuan dari Australia ini dijadwalkan pada akhir September ini.

Bantuan dengan nilai sebesar Rp 1,015 miliar ini difokuskan pada wilayah Kerok Laut, Kelurahan Penajam. Sebanyak 100 sambungan rumah (SR) dibangun di sana.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda AM) Danum Taka, Abdul Rasyid, mengatakan bahwa sambungan ini diberikan kepada masyarakat pesisir yang belum memiliki akses layanan air bersih.

"Progres pemasangannya telah mencapai 80 persen, dan kami menargetkan agar dapat berfungsi maksimal pada September 2023 ini. Jadi, dalam waktu dekat, fasilitas

ini dapat beroperasi, sedang dalam proses penyelesaian," ungkapnya pada Selasa (12/9/2023).

Dijelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari perluasan jaringan perpipaan hingga pembangunan gedung pelayanan. Selain itu, Perumda AM Danum Taka juga melaksanakan pengadaan pompa booster dan pompa chemical serta perluasan bangunan pelayanan.

Sebagai informasi, hingga saat ini cakupan pelayanan air bersih oleh pemerintah daerah di seluruh PPU baru mencapai 31 persen. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, menyatakan bahwa perluasan jaringan air bersih tetap akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 ini, tidak ada penambahan jaringan

dengan skala besar. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada program sambungan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Semoga pada tahun depan, kami dapat melaksanakannya dalam jumlah yang cukup besar," katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kembali 5.000 sambungan rumah kepada pemerintah pusat pada tahun 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan sambungan air bersih bagi masyarakat.

"Secara bertahap, kami berupaya memenuhi wilayah lainnya," pungkas Hamdam. (SBK)



DPRD Kaltim saat pelaksanaan Rapat Paripurna.

## Permendagri Penetapan Pj Gubernur Disebut Aturan “Banci”

**SAMARINDA** - DPRD Kaltim telah mengirim lima usulan nama Calon Penjabat Gubernur Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri RI. Nama yang dikirim merupakan hasil usulan dari seluruh fraksi di DPRD Kaltim.

Semestinya DPRD Kaltim, cukup mengusulkan tiga nama saja bila mengacu pada Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang aturan teknis pengangkatan Pj Kepala Daerah.

Fraksi Demokrat - NasDem DPRD Kaltim bahkan mengusulkan untuk melakukan voting dilakukan seluruh Legislator DPRD Kaltim untuk mencapai tiga nama. Namun berdalih mengakomodir semua usulan fraksi, dan berdasar Rapat Pimpinan (Rapim), Ketua DPRD memutuskan membawa lima nama.

“Kita kirim tiga pun belum tentu disetujui, makanya kita kirim semua. Tetap saja dari kemarin-kemarin semua dari pusat. Kalau pun ada yang terpilih dari sekda itu sudah dititip di situ,” ucapnya.

Hasan juga menilai Permendagri yang ditetapkan 4 April 2023 tersebut masih memiliki celah yang harus dibenahi. Karena tidak ada diatur siapa yang dapat menjadi asesor untuk melakukan penilaian.

“Agak banci sih aturan itu, karena

kita nggak ada orang sebagai asesor tetap kembali ke pusat, mendagri tapi dari presiden,” tegasnya.

Sebagai informasi, berikut adalah lima nama yang menjadi usulan DPRD Kaltim untuk menjadi Pj Gubernur Kaltim, gantikan Isran Noor yang akan habis masa jabatannya 1 Oktober mendatang.

1. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Drs. H. Alimuddin, M.Si
2. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin
3. Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si
4. Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, M.PP
5. Rektor Universitas Mulawarman Prof. Ir. Abdunnur

Akademisi Universitas Mulawarman, dari Fakultas Hukum, Warkhatun Najidah, memberikan tanggapannya terkait Permendagri tentang Pj Kepala Daerah.

Menurutnya peraturan tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan siapa yang akan menyambung roda pemerintahan yang akan ditinggalakan Kepala Daerah yang notabenehnya dipilih oleh masyarakat.

Seolah-olah dalam Permendagri hubungan yang terjadi hanya terjadi antara Kemendagri dan DPRD Kaltim saja tanpa melibatkan masyarakat dan lembaga lainnya. Terlebih dalam aturan teknis tersebut, tidak ada uji kepatutan dan uji kelayakan dalam proses seleksi Pj Gubernur.

“Pj sangat strategis, sistemnya saja tidak lengkap. Itu yang membuat hari ini pola hubungan pusat dan daerah itu tidak equality,” pungkaskannya.

Gubernur Kaltim Isran Noor sendiri, turut angkat bicara terkait siapa yang akan menggantikannya dalam mengisi kekosongan jabatan KT1. Ia berharap, tidak ada unsur politik dalam penentuan Pj Gubernur Kaltim.

Siapapun Pj Gubernur Kaltim, menurutnya, harusnya adalah sosok yang mampu melanjutkan program kerja semasa kepemimpinannya.

“Jangan bernuansa politis, tapi kepentingan program, itu saja. Program sudah ada, tinggal jalan. Mau dilanjut atau tidak. Hampir semua yang diprogramkan itu semua prioritas,” tutup Isran.

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (kiri), bersama Gubernur Kaltim Isran Noor.

## Optimisme Wakil Ketua DPRD: Tidak Akan Ada Kekosongan Jabatan di Kaltim

**SAMARINDA** - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, yakin tidak akan ada kekosongan jabatan atau bahkan status quo dalam roda pemerintahan di Provinsi Kaltim.

Penegasan ini menjawab pertanyaan Media Kaltim terkait kemungkinan lambannya proses penetapan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Samsun optimistis bahwa Kemendagri saat ini tengah berproses untuk menetapkan Pj Gubernur

Kaltim dan tidak akan ada status quo. Status quo sendiri adalah kondisi yang tetap, tidak ada perubahan apa pun.

"Nama sudah kita usulkan, rapat atau seleksi di sana (Kemendagri) juga sedang diproses, tidak mungkin ada status quo. Kalaupun ada dalam kondisi darurat masih ada sekda yang menjalankan pemerintahan," tegasnya usai Rapat Paripurna, Selasa (9/9/2023).

Terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kaltim, bila belum ada Pj Gubernur Kaltim sendiri dinilai

Samsun juga tidak akan terjadi.

Politisi PDI Perjuangan ini yakin betul bahwa akan ada nama yang ditetapkan sebagai Pj Gubernur sebelum masa jabatan Isran-Hari berakhir pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Plt pun harus ada SK. Saya yakin itu pasti selesai, banyak yang memikirkan hal itu. Untuk namanya kita tunggu, kalau sudah ada Pj, kita akan mengumumkannya. Setelah keluar SK Kemendagri mengenai Pj-nya, pasti akan kita sampaikan," pungkasnya. (eky)

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

**BOOKING THS SAJA**

**BTS**  
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

**Kode Promo**  
**BTSOLI**

\*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang